

MAYOR TEUKU MANYAK



- NASRUL HAMDANI -



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH

MAYOR TEUKU MANYAK

NASRUL HAMDANI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH
2022**

MAYOR TEUKU MANYAK

Pengarah Program

Drs. Nurmatias

(Plt. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh)

Penulis

Nasrul Hamdani, S.S.

Editor

Dra. Ratna, M.S.

Desain Sampul

M. Faiz Basyamfar

Tata Letak

Siti Nur Aida F.

v + 35 hlm: 14,8 x 21 cm

Cetakan pertama, Oktober 2022

Penerbit:

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Aceh

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17, Gampong Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, 23123

<http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh>

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN:

SEKAPUR SIRIH
KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI ACEH

Peristiwa Darul Islam (DI) menjadi babak penting dalam sejarah Indonesia. Cerita tentang pemberontakan “kaum Republik” ini menandai betapa dinamika mewujudkan gagasan kesatuan Indonesia berlangsung sangat keras, bahkan tahun 1950-an, tahun meletusnya rangkaian pemberontakan daerah itu didaulat sejarawan sebagai tahun paling dinamis dalam sejarah Indonesia.

Penerbitan Seri Informasi Sejarah berjudul *Mayor Teuku Manyak* ini memberikan suatu pandangan dari sisi dan pengalaman Teuku Manyak, perwira TNI yang taat perintah dan Aceh tulen yang terus mempertahankan prinsip di tengah pergolakan politik antara Aceh dan Jakarta. Pengalaman Teuku Manyak selama peristiwa Darul Islam bergolak di Aceh akan menjelaskan arti pengorbanan yang sesungguhnya.

Kami berharap, buku kecil ini dapat memberikan pandangan dan keterangan baru yang dapat mendorong kesadaran sejarah bahwa peristiwa Darul Islam serta pemberontakan lain itu adalah penanda bahwa gagasan kesatuan Indonesia itu harus terus ditumbuhkembangkan secara jujur, terbuka, berkeadilan, merata dan konkret adanya. Pengalaman berperang dengan rekan sendiri bukanlah pengalaman yang patut dibanggakan melainkan dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi.

Banda Aceh, Oktober 2022

Drs. Nurmatias
NIP 196912261997031001

KATA PENGANTAR PENULIS

Boleh dibilang tidak banyak orang di Aceh yang mengetahui kisah Teuku Manyak sebagai tentara. Ia lebih dikenal sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, partai yang selalu memenangi Pemilihan Umum di Aceh sejak penggabungan partai politik pada 1973 hingga akhir pemerintahan Orde Baru.

Barangkali juga, tidak banyak pula yang tahu jika Teuku Manyak adalah salah satu Perwira TNI Aceh yang menjadi korban perseteruan politik menjelang akhir pergolakan DI/TII dan awal kecamuk Sumatera akibat Gerakan PRRI. Manyak karena terus mencoba membujuk Tgk. Daud Beureueh yang pindah ke Beureunuen dituduh terlibat DI/TII.

Buku kecil seri informasi sejarah ini menceritakan beberapa bagian kisah hidup Mayor Teuku Manyak dan hubungannya dengan rentetan peristiwa yang kelak menjadi cerita sejarah Aceh, mulai dari masa kolonial, kemerdekaan hingga pergolakan DI/TII yang mengubah pandangan Jakarta terhadap Aceh, “Daerah Modal” menopang eksistensi Indonesia selama 1945-1949.

Rentetan inilah yang membuat kisah hidup Teuku Manyak istimewa terutama dalam memahami konflik di Aceh yang mendorong perubahan dan kesinambungan sosial di Aceh sejak kemerdekaan hingga kini.

Banda Aceh, Oktober 2022

Nasrul Hamdani

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	<i>iii</i>
Kata Pengantar Penulis	<i>iv</i>
Daftar Isi	<i>v</i>
Prolog	<i>1</i>
Aneuk Indrapuri	<i>3</i>
Perwira Gyugun dan TNI	<i>14</i>
Di Antara DI dan RI	<i>29</i>
Epilog	<i>36</i>
Daftar Pustaka	<i>38</i>

PROLOG

Ahad, 20 September 1953 menjadi babak baru dalam sejarah Aceh. Hari itu Teungku Muhammad Daud Beureueh menyatakan bahwa Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan S.M. Kartosuwirjo di Tasikmalaya sekira empat tahun sebelum hari itu.ⁱ Hari itu pula, Aceh yang baru saja dilebur dalam Provinsi Sumatera Utara meresmikan diri menjadi Negara Bagian Aceh (NBA).

Hari ketika orang Aceh, “Kaum Republik yang memberontak” kepada Republik itu jadi momen penyambung cerita tentang orang-orang yang pernah takluk dengan senjata itu kembali memanggul senjata untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang belum terwujud. Hari itu menandai bahwa Aceh seperti “ditakdirkan” terus bergolak dari masa kolonial bahkan hingga masa sesudahnya.

Peristiwa hari itu “membelah” para pejuang Aceh yang pernah bahu membahu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Satu pihak dari kalangan pejuang dan orang Aceh memilih berjuang bersama DI/TII satu pihak lainnya memilih berdiri bersama Republik. Ini membuat kedua belah pihak berada dalam posisi berhadapan-hadapan, saling curiga hingga harus bersabung.

Sukar dihitung berapa jumlah korban selama pergolakan 1953-1962 itu. Namun satu yang pasti orang Aceh menanggung beban sejarah oleh pengalaman hidup terbelah itu. Hubungan merenggang karena ada pihak yang “dikalahkan” pihak lain. Ini menjadi warisan dari masa lalu yang diakui atau tidak diakui masih mengganggu dinamika politik di Aceh hingga kini.



Mayor TNI Teuku Manyak (1913-1995)
(Sumber: Ilham Syahputra, Keluarga Teuku Manyak, Ajun Jeumpet -
Aceh Besar)

ANEUK INDRAPURI

Manyak lahir pada 15 Juli 1913 di kampung Lam Ilie, Indrapuri. Ayahnya bernama Teuku Puteh, *uleebalang* Indrapuri dan ibunya bernama Cut Asiah. Dalam struktur sosial Aceh di masa lalu, *uleebalang*, yang di depan nama kecilnya tersemat gelar Teuku untuk lelaki atau Cut untuk perempuan menjadi penanda status sosial mereka sekaligus representasi kekuasaan dan kebudayaan Aceh hingga kini.

Oleh karena itu, merupakan sebuah kehormatan bagi seseorang menyandang gelar itu. Namun di balik kehormatan itu terselip amanah dan kewajiban yang dibebankan dengan pengharapan oleh masyarakat Aceh. Amanah dan kewajiban sebagai *uleebalang* itu harus diemban dan dijalankan sungguh-sungguh oleh siapapun yang terlahir dari golongan ini, termasuk pada Manyak.

Terlahir sebagai anak *uleebalang* membuat kehidupan Manyak sedikit-banyak lebih baik dari orang kebanyakan. Ia punya “pengikut”, dipanggil *Ampon* sebagai tanda hormat pada penyandang status itu dan mendapatkan kemudahan untuk merasakan hal-hal yang tidak dapat dinikmati orang kebanyakan pada masa ia bertumbuh, seperti merasakan duduk di bangku sekolah jenjang atas.

Tidak banyak keterangan mengenai kehidupan dan pendidikan Manyak. Namun seperti jika dibandingkan dengan arah perkembangan pendidikan formal di Aceh terutama sejak Kutaraja dikuasai, pendidikan di kota ini tergolong baik apalagi sesudah *Volksschool* mulai menamatkan murid-muridnya termasuk sekolah rakyat atau sekolah kelas tiga yang didirikan pemerintah maupun partikelir mulai bermunculan.

Perkembangan pendidikan formal di Aceh masa kolonial itu terbilang pesat meskipun dilandasi oleh niat pemerintah Hindia Belanda menggantikan sistem pendidikan tradisional yang ditulis Reid “menanamkan rasa benci dan kutukan kepada kaum kafir (Belanda)”.ⁱⁱ Pesatnya perkembangan itu ditandai hadirnya Taman Siswa dan Muhammadiyah yang mendirikan sekolahnya.

Sejak 1907, Volksschool sudah berdiri di berbagai kota utama di Aceh. Bahasa Melayu jadi bahasa pengantar sehingga sekolah ini cepat berkembang. Sampai tahun 1935 jumlah murid Volksschool di Aceh sudah mencapai 35.000 orang, suatu jumlah yang cukup besar. Mengikuti perkembangan Volksschool, Holland Inlandse School (HIS) pun didirikan. Jumlah ada delapan pada 1938 dengan 1.500 murid.

Jumlah sekolah ini belum termasuk Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) yang berdiri sejak 1930 atau Vervolgschool yang berdiri belakangan sebagai sekolah lanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Murid-murid dari sekolah lanjutan ini kelak menjadi bagian penting dari pembentukan golongan terpelajar, birokrat, elite politik maupun elite militer Aceh dari masa kolonial, Jepang hingga jauh sesudah kemerdekaan.ⁱⁱⁱ

Barangkali pada salah satu sekolah di Aceh Besar atau Kutaraja itulah Manyak menuntut ilmu. Sebagai orang Aceh yang menyandang gelar Teuku dan mengenyam pendidikan Belanda Manyak diwajibkan mengaji. Ia harus mengaji yang juga berarti belajar membaca al-Qur’an, memahami isinya, menulis *Jawoe*, memahami tauhid, hukum Islam dan sejarah.

Manyak mengaji pada Teungku Abdul Muthalib atau lebih dikenal luas sebagai Teungku Bintang Reukih di *dayah*-nya. Jarak antara *dayah* Reukih dengan rumah Manyak hanya sepelemparan batu. Selain karena jarak itu, Teuku Puteh-pun berkarib dengan Teungku Bintang Reukih ini sehingga Manyak senang saja mengaji di sana. Ia tidak perlu menginap seperti anak *dayah* yang berasal dari jauh. Begitupun dari *dayah* inilah masa depan Manyak bermula.

Suatu waktu dan entah apa yang mendorongnya, Manyak “menodong” Teungku Bintang Reukih dengan pernyataan “*Teungku, loen keume meukawen ngon aneuk Teungku*”.^{iv} Teungku Bintang Reukih tersenyum simpul lalu menjawab sebagai jawaban berisi syarat “*jeut tapi droeneuh haroeh meubuet bak loen!*”

Waktu Manyak “menodong” Teungku Bintang Reukih, ia masih tergolong remaja tanggung, umurnya belum cukup untuk disebut dewasa sedangkan anak perempuan Teungku Bintang Reukih pun masih sangat kecil dan belum pantas pula untuk dinikahkan meskipun gantung seperti kebiasaan masa itu. Namun “todongan” Manyak itu disambut baik oleh Teungku Bintang Reukih.

Sambutan Teungku Bintang Reukih pada Manyak “diikat” Teuku Puteh dan Cut Asiah, isterinya dengan mengirim *ija ayon*; kain panjang untuk mengayun yang dibuat khusus untuk Maryam kecil. Di tepian kain ayunan itu diselipkan untaian batangan-batangan emas sebesar korek api.^v Ini menjadi tanda betapa besar harapan Teuku Puteh pada keluarga Teungku Bintang Reukih.

Manyak menikahi Maryam anak Teungku Bintang Reukih itu pada tahun 1939. Adik Manyak, Teuku Johan (*sic*) ditugaskan sang ayah untuk mengantarkan kain dan kepingan emas sebagai tanda pinangan kepada Maryam. Menurut keluarga Manyak, jumlah pinangan yang disebut sebagai Ringgit oleh keluarga dan kebanyakan orang Aceh pada waktu itu, kira-kira setara dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- masa kini.



Teuku Manyak dan Maryam ketika bersanding di Indrapuri, 1939
(Sumber: Ilham Syahputra, Keluarga Teuku Manyak, Ajun Jeumpet - Aceh Besar)

Pernikahan Manyak dengan Maryam meski berstatus kawin gantung tetap dilangsungkan meriah. Apalagi pernikahan itu menyatukan dua keluarga terpandang di Indrapuri, pengantin lelaki dari keluarga bangsawan sedang mempelai perempuan merupakan anak ulama. Foto pengantin mereka masih terjaga sampai kini meski sudah mulai buram termakan usia. Ketika menikah, Maryam baru berumur 13 tahun sedangkan Manyak sudah 26 tahun. Beda usia keduanya terpaut 13 tahun. Masa itu kawin gantung merupakan hal biasa yang dilakukan orang-orang Aceh terutama untuk mengukuhkan hubungan dengan pihak keluarga besan.

Entah apa dan mengapa Manyak memilih Maryam padahal ia belum mengenal dan harus sabar pula menanti pujaan hatinya mencapai usia pantas untuk menikah. Cerita penantian Manyak ini dikenang sanak keluarga sebab hanya waktu yang dapat menjawab bahwa setelah Maryam meninggal dunia pada tahun 1976, Manyak tidak pernah menikah lagi hingga akhir hayatnya, padahal menurut anak-anak dan cucunya beliau mampu untuk menikah lagi.

Selama menjalani kawin gantung, baik Manyak maupun Maryam tinggal di rumah orang tua dan beraktivitas masing-masing. Sesekali mereka untuk sekedar *marit*. Barulah setelah umur Maryam 16 tahun, mereka bisa berkumpul sebagai pasangan suami-isteri. Oleh karena Maryam terbilang belia dan tidak kesepian adik Maryam, Hafsah namanya ikut tinggal bersama keluarga muda ini.

Pasangan baru ini menempati sebuah rumah panggung yang cukup besar di gampong Lam Ilie Ganto, Indrapuri. Dari rumah inilah rumah tangga dan karir Manyak dimulai. Apalagi tidak lama setelah berkumpul dengan suaminya, Maryam dapat langsung mengandung anak pertama mereka. Ketika Maryam mengandung, Jepang yang “diundang masuk” dari Sho-nan (Singapura) oleh Said Abubakar pun telah pula menjadi “penguasa baru” di Aceh menggantikan Belanda yang menyerah kalah pada 1942.^{vi}

Anak pertama Manyak yang lahir masa Jepang diberi nama Cut Asiah, sama dengan nama ibunya yang meninggal dunia ketika ia masih remaja. Pemberian nama untuk anak perempuan sulung Manyak itu merupakan caranya mengenang dan menghormati sang ibu, Cut Asiah Binti Teuku Raja Lam Ilie. Pun demikian Cut Asiah anak Manyak yang lahir masa ketika Jepang masih berkuasa ini, bahwa namanya sama dengan nama neneknya merupakan kebanggaan sendiri baginya.

Setelah Cut Asiah sudah agak besar barulah dia mendapatkan adik, tanpa disangka dua orang sekaligus! Mereka, adik Cut Asiah itu terlahir kembar yaitu Teuku Marzuki dan Cut Marliani, tetapi adik perempuannya tidak berumur panjang. Cut Marliani meninggal dunia sewaktu bayi. Sesudah itu secara berurutan lahir pula Cut Maimunah, Cut Mardiah, Mardiani, Cut Makrufiati dan Teuku Maimunyah. Dari delapan anak pasangan Manyak dan Maryam, Cut Mardiani menyusul kakaknya yang terlahir kembar itu.

Pada masa-masa awal pengantin baru, Manyak lebih banyak menghabiskan waktu di sawah dan ladang miliknya di sekitar Indrapuri. Inilah pekerjaan yang dilakoninya sebelum menikah. Namun ketika bergabung dengan *Gyugun*, waktu, perhatian dan tenaganya lebih banyak tercurah pada kegiatan badan militer bentukan Jepang ini, mulai dari berlatih hingga bertugas penuh di Seulimeumeum

Keikutsertaannya dalam badan kemiliteran Jepang di Aceh seperti kesempatan sekaligus kebetulan. Sebagai daerah terdepan, Jepang yang kekurangan pasukan membentuk pasukan sukarela di Sumatera, namanya *Gyugun*. Syarat memasuki Gyugun antara lain bisa membaca, menulis dan berhitung. Inilah sebab mengapa banyak lulusan Sekolah Rakyat mendaftar, selain karena ada sentimen anti-Belanda, menjadi *Gyugun* berarti mendapatkan pekerjaan.

Semula Manyak tidak berminat dengan *Gyugun* yang kerap disebut Tentara Rakyat Sumatera ini. Barulah setelah Teuku Puteh, ayahnya memberi pandangan terutama atas permintaan seorang perwira Jepang yang bertugas di Seulimeumeum, Manyak tertarik dan mendaftarkan diri. Inilah awal Manyak memasuki dunia militer.^{vii}

Pendidikan militer masa Jepang ini membentuk sifat, sikap dan kepribadian Manyak yang lahir dan tumbuh di masa kolonial di mana kisah kepahlawanan pejuang Aceh dalam *Atjeh Oorlog* masih diceritakan orang banyak. Seperti hal yang disangkakan kebanyakan pada orang Aceh, Manyak memiliki semua sikap keras serta teguh memegang prinsip. Prinsip inilah yang membuatnya berbeda dengan orang lain terutama ketika memilih menjadi tentara lalu berpolitik.

Sikap keras dan teguh memegang prinsip ini sesungguhnya mulai tampak sejak kecil. Misalnya, Manyak pernah menolak ketika Teuku Puteh menganjurkannya agar tinggal dengan isteri kedua

Teuku Puteh atau ibu tirinya bernama Syarifah. Ia menolak dan memilih meninggalkan rumah dan bekerja di Sabang untuk beberapa lama.

Tidak diketahui berapa lama Manyak berada di pulau yang juga dikenal dengan nama Pulau Weh ini. Belakangan diketahui, untuk menghidupi diri selama di pulau yang kemudian dikenal sebagai pelabuhan bebas, Manyak bekerja di “rumah sakit orang gila!” begitu katanya.^{viii} Barangkali, inilah *hospitaal* yang digunakan Belanda untuk merehabilitasi orang-orang Aceh yang ditangkap karena terlibat dalam aksi-aksi *Atjeh moorden* sejak Kutaraja dikuasai.

Merujuk garis keturunannya, sifat-sikat Manyak itu agaknya berasal dari kakeknya, Teuku Raja Lam Ilie. Berdasarkan cerita keluarga, suatu ketika Teuku Raja Lam Ilie ini bercanggah dengan mertuanya Panglima Polem karena satu persoalan. Setelah sekian lama, percanggahan itu tidak juga mencapai titik temu malah semakin rumit. Agar masalahnya tidak berlarut-larut, Teuku Raja Lam Ilie pun terpaksa menceraikan puteri Panglima Polem yang telah diperistri sejak lama.

Panglima Polem marah besar. Kekuasaan sang menantu atas kampung-kampung yang berada di tangan *Chik* Manyak ini dicabut. Panglima Polem ini merupakan sosok legendaris dalam sejarah Aceh. Sebagai Panglima Sagoe XXII dan Kepala Mukim Aceh Besar Panglima Polem menjadi salah satu penguasa Aceh masa itu sehingga mudah saja baginya mencabut wewenang menantunya yang berkuasa atas Indrapuri. Peristiwa ini memaksa Teuku Raja Lam Ilie angkat kaki meninggalkan Indrapuri.

Setelah meninggalkan Indrapuri, Teuku Raja Lam Ilie diceritakan menetap di Panga di pesisir Teunom. Menurut kisah Panga ini daerah otonom yang diberikankan Sultan Aceh untuk orang-orang Turki. Oleh karena itu garis keturunan penguasanya memiliki hubungan darah dengan Turki. Barangkali, karena status otonom itulah mengapa daerah di tepi pantai itu dinamai Teunom. Kata otonom “terpleset” jadi *Teunom*.

Di Panga Teuku Raja Lam Ilie diterima dengan baik oleh Teuku Imeum Muda, penguasa Teunom yang namanya tercatat dalam sejarah sengketa maritim dunia karena terkait langsung dengan peristiwa Nisero. Ceritanya, penguasa Teunom ini menawan kapal SS

Nisero yang kandas di Panga dan meminta tebusan sebesar \$ 10.000 tunai kepada pemilik kapal berbendera Inggris itu. Penawaran ini menimbulkan ketegangan antara Inggris dan Belanda, karena Belanda mengira Aceh sepenuhnya sudah berada di bawah kekuasaan Belanda.

Dari Kutaraja, Belanda mengirim kapal perang *Benkoelen* untuk membebaskan SS Nisero dari tawanan Teuku Imeum Muda. Singkat cerita, Teuku Imeum Muda yang waktu itu masih terbilang masih muda itu, ditulis oleh Anthony Reid, dikenal berkemauan keras, saleh dan memiliki harga diri yang tinggi,^{ix} menolak semua tuntutan Belanda. Ketika Belanda mulai mengadudomba dengan memanfaatkan musuh-musuh politik Teuku Imeum Muda untuk menyerang Teunom, saat itulah Teuku Raja Lam Ilie mulai berperan.

Seperti Teuku Imeum Muda itu, sumber penghasilan utama Teuku Raja Lam Ilie di Panga pun berasal dari lada. Masa itu bersama Teunom, Bubon, Rigaih dan Meulaboh, Panga juga terkenal sebagai penghasil lada Aceh bermutu tinggi. Para pembeli yang umumnya *country traders* Inggris dari Pulau Pinang dan Singapura dapat langsung membeli lada di pelabuhan di negeri-negeri tersebut. Teunom tercatat sebagai daerah pelabuhan yang menjual lada paling banyak di antara negeri-negeri lain di kawasan itu.

Kemakmuran negeri-negeri lada di Pantai Barat Aceh itulah yang menarik banyak orang untuk datang mengadu peruntungan termasuk kakek Manyak ini. Dari hasil bertanam dan menjual lada di Panga itu, Teuku Raja Lam Ilie dapat membangun kembali reputasinya sebagai *uleebalang*; memerintah kawula dan berkuasa atas suatu daerah. Menurut salah satu cicitnya, *Chik* Manyak ini memiliki 17 pucuk meriam ukuran besar untuk menjaga daerah kekuasaannya di Panga sekaligus membantu pertahanan Teunom.

Masa itu pula, Teunom dan sejumlah negeri di Pantai Barat Aceh merupakan negeri-negeri yang merdeka meski Kutaraja sudah dikuasai Belanda. Oleh karena itu, wajar saja jika Teuku Imeum Muda tak segan menawan SS Nisero dari Inggris. Kapal dagang itu kandas di perairan Teunom dan berdasarkan hukum laut menjadi milik penguasa Teunom. Peristiwa Nisero ini menjadi masalah serius dan berimplikasi luas. Kabar mengenai peristiwa itu diberitakan secara luas mulai dari Penang, Singapura hingga ke Eropa.

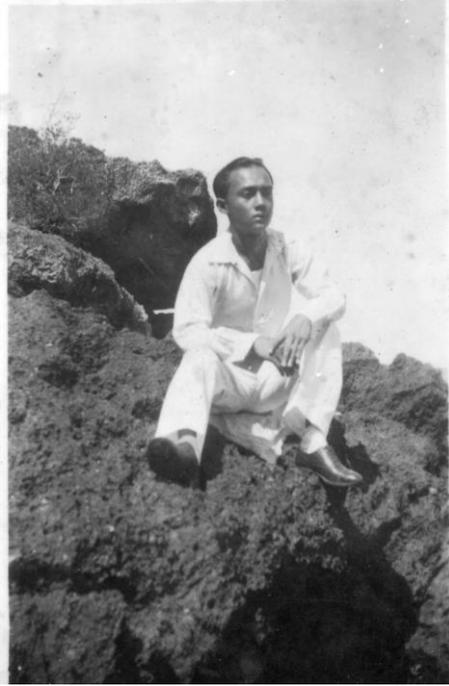
Selama Nisero ditawan stabilitas di Teunom terganggu. Kapal perang Belanda yang dikirim dari Kutaraja langsung membuang sauh di tengah lautan dan bersiaga penuh. Dentuman meriam pun jadi lebih sering terdengar. Serangan gerombolan pengacau lokal yang dimanfaatkan Belanda sering terjadi. Keadaan ini membuat Teuku Imeum Muda geram apalagi salah satu pimpinan pengacau Teunom itu menyatakan ingin menyunting Cut Gadih Baren, puterinya yang cantik.

Teuku Imeum Muda, ayah Cut Gadih Baren tidak pernah sudi menerima pengacau lokal itu. Si pimpinan ini sudah dikenal oleh banyak orang di daerah Pantai Barat sebagai pematid dan suka berjudi sabung ayam. Ia keturunan uleebalang juga tetapi tidak patut diteladani oleh anak-buah yang memegang senjata. Inilah alasan utama mengapa penguasa Teunom ini tidak ingin menantu seperti itu selain ia berpihak pada Belanda tentunya.

Setelah sekian lama memilih bertahan dari aksi-aksi pengacauan itu, akhirnya Teuku Imeum Muda mengadakan sayembara besar. Dalam sayembara berisiko tinggi itu diumumkan, bagi siapa saja lelaki yang dapat mengusir dan menghentikan aksi pengacau lokal di sekitar Pantai Barat Aceh yang memang terbukti disokong Belanda itu, akan berhak untuk mempersunting Cut Gadih Baren puterinya. Cut Gadih Baren inilah hadiah dari sayembara itu

Teuku Raja Lam Ilie yang menduda itu ikut ambil bagian dalam sayembara itu. Laskar Teuku Raja Lam Ilie, kabarnya dilatih Janisari mulsi dikerahkan menggempur kubu-kubu pengacau dengan meriam-meriam buatan Turki yang diperolehnya dari keuntungan berdagang lada. Gempuran Teuku Raja Lam Ilie waktu itu tidak mampu diatasi hingga gerombolan bersenjata itu lari tunggang-langgang dari kubu terakhir mereka di kawasan Pantai Barat Aceh yang sesungguhnya indah itu.

Singkat cerita, Teuku Raja Lam Ilie berhasil mengusir pengacau itu dan memenangkan. Ia pun berhak untuk menikahi Cut Gadih Baren. Dari pernikahan Teuku Raja Lam Ilie dengan Cut Gadih Baren lahir empat anak perempuan yaitu Cut Fatimah, Cut Asiah, Cut Linggam dan Cut Rahimah. Anak-anak Teuku raja Lam Ilie ini kemudian menurunkan sejumlah tokoh terkemuka di Aceh termasuk Cut Asiah, anak kedua Teuku Raja Lam Ilie yang menjadi ibunda Manyak.



Teuku Manyak di masa muda
(Sumber: Ilham Syahputra, Keluarga Teuku Manyak, Ajun Jeumpet -
Aceh Besar)

PERWIRA GYUGUN DAN TNI

Gyugun di Aceh yang dilatih Mayor Omura mensyaratkan calon kadetnya memiliki ijazah setidaknya sekolah rendah. Selain itu, kesempatan untuk mengikuti pendidikan lebih terbuka dan mandiri sehingga pada akhir pendudukan Jepang, Aceh memiliki jumlah perwira dan prajurit paling banyak di Sumatera.^x Prajurit Aceh hasil pelatihan Jepang ini lebih terampil karena Jepang lebih fokus dan memasok senjata lebih banyak dibanding daerah lainnya di Sumatera.

Menurut Tgk. A.K. Jakobi, selain *Gyugun* ada dua badan kemiliteran lain Aceh yaitu *Tokubetsu Keisatsutai* dan *Tokubetsu Hikoyo Kinmutai*. Entah badan kemiliteran apa ini tetapi menurutnya badan ini juga melahirkan perwira-perwira berbakat juga tangguh. Para perwira dari dua badan ini ditambah para *Choi* atau para Letnan Dua lulusan *Gyugun* menjadi tokoh-tokoh pelopor, penggerak dan pembangun kesatuan bersenjata di Aceh, mulai dari API, TKR, TRI sampai TNI.^{xi}

Pendidikan *Gyugun* inilah yang dijalani Manyak.^{xii} Setelah latihan dasar, oleh karena ia pun punya ijazah tinggi Manyak langsung melanjutkan pendidikan perwira. Setelah menyelesaikan Pendidikan dan menyandang pangkat *Choi* atau Letnan Muda, Manyak ditugaskan di Seulimeumeum. Setiap hari selama bertugas di sana, Manyak melakoni perjalanan sejauh 40 kilometer pergi ke Seulimeumeum dan kembali lagi Indrapuri.

Di Seulimeumeum ini terdapat satu kompi Pasukan Istimewa Jepang yang membangun markas sekaligus barak di puncak perbukitan. Kompi Istimewa ini dikenal karena banyak cerita aneh yang muncul dari lingkungan markasnya yang dikesankan angker

agar tidak ada orang yang berani ke sana. Selain itu, kompi ini memiliki perlengkapan artileri memadai untuk menangkis serangan udara serta senjata otomatis. Selama Jepang berkuasa, di sekitar lingkungan markas Kompi Istimewa yang angker inilah Manyak ditugaskan.

Sebagai perwira, tugas yang diemban Manyak terhitung berat. Masa itu memang Belanda sudah tidak tampak lagi tetapi ketika kabar angin tersiar bahwa Jepang mulai terdesak oleh tentara Amerika di front Asia-Pasifik, tugas berjaga lebih sering dilakukan. Meskipun begitu, Manyak tetap menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di Indrapuri lalu kembali ke Seulimeumeum esok paginya. Begitulah hari-hari dijalani Manyak hingga Proklamasi Kemerdekaan diumumkan di Aceh.

Selama menjadi perwira *Gyugun*, Manyak dikenal sebagai perwira yang loyal, cerdas, lugas dan tegas. Ia disukai oleh sejumlah perwira Jepang atasannya, termasuk seorang yang dikenal orang Aceh dengan nama panggilannya saja: Korewa! Si Korewa ini sering datang ke rumah Manyak tetapi tidak pernah singgah untuk sekadar berbasa-basi. Jika ada orang berteriak memanggil Manyak dari persimpangan jalan dekat rumah mereka maka Maryam atau yang dipanggil Nyak Mi oleh kemenakannya langsung tahu saja kalau si Korewa sudah menunggu dengan mobilnya untuk menjemput Manyak.^{xiii}

Korewa ini adalah seorang perwira Jepang yang kemudian memihak Republik selama perang kemerdekaan. Seperti kebanyakan tentara Jepang masa itu, wajah Korewa nampak cemberut saja, bicaranya keras, bahasa Melayu-nya kurang jelas pengucapannya dan terkesan selalu berteriak. Namun ia dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkungan baru. Ini membuat kekurangan pada sifatnya itu tertutupi oleh kelebihanannya yang mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya.

Hubungan Manyak dan Korewa cukup dekat. Kedekatan itu juga berlanjut pada keluarga Manyak dan Maryam. Ketika Korewa menikahi seorang perempuan Indo-Belanda yang dipanggil tante oleh anak dan kemenakan Manyak di Kutaraja, salah satu saudara ipar Maryam yang mengawinkan mereka. Waktu Darul Islam meletus di Aceh, Korewa dan tante Indo-Belanda itu pindah ke Medan.

Di Medan, Korewa tetap menjalin hubungan dengan keluarga ipar Banyak, Hafsah. Hafsah yang sudah dinikahi Razali tidak lama setelah kakaknya Maryam melahirkan adik Cut Asiah juga tinggal di Medan. Keluarga Hafsah dan Razali ini tinggal dalam lingkungan yang sama dengan keluarga Korewa di sekitar jalan Japaris yang sekarang berubah namanya menjadi jalan Rahmadsyah di Kotamatsum; bekas kawasan *sultagron* Deli yang sudah beralih kepemilikan.

Orang Aceh punya cerita tersendiri tentang keberadaan Jepang di Aceh selama 1942-1945. Masuknya Jepang ke Aceh tidak lepas dari andil Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan Said Abubakar. Konon, Jepang “diundang” datang ke Aceh. Hal ini menjadi penanda adanya pertentangan antara golongan *uleebalang* dengan ulama di Aceh yang sudah berlangsung sejak masa kolonial. Inilah periode penting yang menentukan gejolak dalam hubungan antara dua golongan itu sesudah kemerdekaan.

Ketika berita kekalahan Jepang tersiar, Aceh yang secara politik dikuasai PUSA memutuskan mendukung pendirian Negara Republik Indonesia (NRI) yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Pilihan itu sudah bulat meskipun sebelum menentukan pilihan itu ada suara dan pandangan lain dari beberapa tokoh terkemuka yang menganjurkan “sudah waktunya Aceh menaikkan bendera sendiri” yang berarti berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.



Teuku Manyak berseragam TRI (ca. 1945)

(Sumber: Ilham Syahputra, Keluarga Teuku Manyak, Ajun Jeumpet - Aceh Besar)

Ketika berita kemerdekaan tersiar luas, bekas prajurit *Gyugun* yang “dirumahkan” kembali berhimpun. Laju dan aksi berhimpun inilah yang membuat situasi selama bulan September-Oktober 1945 di Aceh menghangat. Jepang yang terlanjur menarik senjata dari kesatuan *Gyugun*, didesak untuk menyerahkan senjata kembali tetapi tidak banyak orang yang mengambil prakarsa untuk mencari cara merebut senjata Jepang yang memang sedang dibutuhkan itu.

Ketika desakan itu menjadi tuntutan, Manyak yang sudah menjadi Komandan Pasukan TKR di Seulimeumeum mengambil prakarsa untuk “naik ke bukit” bekas markasnya seorang diri. Berbekal sepucuk Vickers, senjata genggam yang biasanya dipegang perwira, Manyak meminta komandan Jepang menyerahkan senjata yang tersimpan di gudang mereka.^{xiv} Negosiasi itu tidak berlangsung lama. Manyak mendapatkan semua senjata. Sebagai imbalan, Manyak menjamin keselamatan semua tentara Jepang hingga diberangkatkan ke Medan untuk selanjutnya dipulangkan.

Sore hari itu juga, Banyak sudah tiba kembali di Indrapuri dengan rangkaian gerbong kereta api yang dipenuhi dengan peti-peti senjata serta amunisi. Tidak diketahui jumlahnya tetapi menurut Jakobi ada 120 pucuk karaben, tiga meriam gunung dan tiga gudang amunisi yang berhasil direbut.^{xv} Sebagian besar senjata dan amunisi itu diturunkan di Indrapuri untuk perlengkapan tempur Pasukan Seulimeumeum yang menjaga lintasan utama ke pusat pemerintahan di Kutaraja dan lintasan utama ke Sumatera Timur. Sisanya diteruskan ke Kutaraja untuk pasukan lain di sana dengan kereta api yang sama pula.

Soal banyaknya jumlah dan kelengkapan senjata Jepang di Aceh sangat berbeda dengan daerah lain di Sumatera. Oleh karena Jepang “tamu-nya PUSA” mereka lebih dihormati. Jepang pun tidak sungkan membalas perlakuan itu secara setimpal. Senjata dan perlengkapan perang di Aceh dipasok dalam jumlah besar untuk mendukung pertahanan mereka di kawasan Selatan (*Nan-Yo*).

Keadaan geografi Aceh yang menurut Anthony Reid seperti “lengan yang terjulur ke India” selaras konsep pertahanan Jepang. Bentangan pantai dan dataran tinggi di Aceh mulai Lhok Nga di Aceh Besar, Geumpang di Pidie, Redelong dan Gunung Setan di Aceh Tenggara sebagai medan gerilya jangka panjang jika suatu saat mereka kalah dalam perang terbuka. Dalam rencana itu, Sabang menjadi bagian terdepan dari sistem pertahanan Jepang di Aceh. Jejak pertahanan Jepang ini masih dapat dilihat sampai kini.

Begitulah pentingnya Aceh masa Jepang. Disebutkan, ketika kontingen tentara Jepang pertama mendarat di Aceh, sebuah kapal selam melego jangkar di sekitar Lhok Seudu untuk menurunkan senjata berat yang kemudian ditempatkan di perbukitan di bibir pantai, mulai dari Ulee Lhuee, Lhok Nga, Lhok Seudu termasuk Sabang. Perbukitan yang dijadikan *bastion* itu menjadi rangkaian dari sistem pertahanan utama Jepang di bagian terdepan pulau Sumatera ini dalam menghadapi serangan Amerika atau Inggris dari Utara.

Di Lhok Nga, yang tidak jauh dari Kutaraja ditempatkan tidak kurang dua batalyon pasukan. Di kawasan perbukitan di tepi pantai yang dijaga ketat ini terdapat lapangan terbang militer, bengkel senjata, gudang mesiu serta fasilitas pendidikan yang ditakuti warga di sekitarnya. Awal Desember 1945 kompleks militer Jepang ini berhasil direbut dalam dua gelombang serangan TKR. Sebanyak 30

meriam berbagai ukuran, senjata serta tujuh gudang amunisi berhasil dikuasai TKR.

Pengalaman masa Jepang dan warisan Jepang inilah yang membuat kekuatan TNI dan barisan perjuangan di Aceh terutama laskar PUSA sangat kuat secara militer dan politik.^{xvi} Belanda, yang pernah mencoba masuk melalui jalur G.C.E. van Daalen di Aceh Tengah dan Tenggara di masa perang Aceh dahulu juga tidak pernah bisa masuk ke Aceh berkat jumlah tentara dan persenjataan yang tergolong baik itu. Inilah sebab mengapa Aceh dijuluki “Daerah Modal”, selain tidak pernah (lagi) diduduki Belanda, orang Aceh pun tak pamrih mengorbankan apa yang mereka miliki untuk Indonesia.

Kabar soal senjata dalam jumlah besar yang “dirampas” Manyak dari Seulimeumeun itu segera beredar luas dalam versi yang berbeda-beda. Selain Manyak, kabarnya ada sejumlah perwira TKR lain yang merebut senjata itu langsung dari Jepang. Terlepas dari klaim, Manyak dan kesatuan sejak pengambilalihan senjata itu telah menetapkan bekas markas Jepang di Seulimeumeun itu sebagai markas kesatuannya.

Masa penataan badan ketentaraan nasional, mulai dari TKR, TRI lalu TNI sedikit banyak menimbulkan sejumlah gesekan di kalangan tentara. Masalah lama antara PUSA yang waktu itu sedang di atas angin dengan *uleebalang* yang berada dalam posisi yang tidak begitu menguntungkan mencuat lagi. Ini membuat suasana cepat memanas dan eskalasi konflik dengan gampang meluas. *Retooling* jabatan dalam organisasi TNI di Aceh yang terpaksa dilakukan Residen Teuku Nyak Arief hingga meletusnya peristiwa Cumbok di Kota Bakti merupakan pemicunya.

Peristiwa berlumur darah di Cumbok itu membuat Manyak yang menjaga pintu masuk ke Aceh Besar dan Kutaraja di Seulimeumeun pasang badan. Ini karena sasaran utama amuk massa itu adalah golongan bangsawan. Massa tidak peduli apakah yang bersangkutan orang Republik atau tidak, pokoknya jika yang tertangkap adalah *uleebalang* pasti dibunuh. Kepada Teungku M. Daud Beurerueh tokoh PUSA terkemuka, Manyak pernah menyatakan keberatan sekaligus keprihatinan kepada panglimanya itu. ‘*Ayahanda, ada satu (seorang) saja Teuku di Aceh Besar yang dibunuh, saya, Manyak akan bangun!*’^{xvii} Kata Manyak.

Sejarah kemudian mencatat, peristiwa Revolusi Sosial 1946 yang berkecamuk mulai dari Cumbok yang terletak tidak jauh dari kota Sigli lalu menjarak bak api hingga ke Langsa tidak menyentuh ke Aceh Besar. Tidak satupun kesatuan laskar PUSA yang dapat melewati Seulimeumeun tanpa sepengetahuan Manyak. Untuk menghindari penyusupan, provokasi dan aksi sepihak kereta api yang melewati berhenti di Seulimeumeun selalu diperiksa secara ketat. Begitulah Manyak bertindak.

Dampak peristiwa yang disebut Revolusi Sosial 1945 itu sangatlah besar. Permasalahannya tersangkut dan berkelindan rumit dengan permasalahan lain yang masih mempengaruhi hubungan sosial di Aceh sampai masa kini. Namun masa setelah Cumbok berkecamuk itu, setelah masalah seolah tampak sudah selesai, hampir seluruh kesatuan TNI di Aceh dihadapkan pada permasalahan baru bahwa Belanda sudah mulai bergerak jauh di Sumatera Utara! Ini membuat penyelesaian masalah Cumbok terkesan selesai begitu saja.

Sejak September 1945, Medan menjadi markas bersama pasukan Brigade-4 Inggris yang bertindak sebagai pemegang *status quo* sekaligus markas bagi Netherlands Indies Civil Administration (NICA), sebuah lembaga yang dibentuk di pejabat pemerintahan Hindia Belanda di pengasingan (Australia) yang disiapkan untuk mengambil kembali Hindia Belanda yang sudah merdeka dan kini bernama Indonesia.

Keberadaan Inggris dan NICA itu mengganggu “euforia” kemerdekaan yang terus dirayakan warga kota Medan. Kota terbesar di Sumatera ini memang tidak langsung dikuasai secara militer tetapi aksi-aksi *stelling*, pengegedahan, unjuk patroli oleh pasukan Inggris, tingkah orang-orang Belanda, rehabilitasi bekas KNIL dan aksi mempersenjatai golongan *Vreemde Oosterlingen* atau penetapan jam malam sudah membuat keadaan di kota yang cuacanya memang panas itu makin panas.

Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Pagi hari itu sebuah kabar beredar cepat. Isinya seorang pemuda Indonesia yang melintas di Pension Wilhelmina yang dijadikan barak dihajar bekas anggota KNIL hanya karena mengenakan emblim bendera Merah-Putih di bajunya. Kejadian itu disaksikan ratusan pasang mata karena Pension Wilhelmina di jalan Bali yang dijadikan asrama oleh tentara Belanda dan bekas anggota KNIL terletak dekat Centralmarkt.

Ketika beberapa orang tampak membela sang pemuda, kerumunan makin bertambah banyak. Massa mulai berteriak-teriak menuntut penganiaya sang pemuda keluar dari barak untuk bertanggung jawab. Namun tuntutan itu diacuhkan, sebaliknya malah dijawab dengan aksi yang bikin darah mendidih. Dua tentara Belanda totok mengendarai sepeda motor melaju kencang dari dalam barak sambil melepaskan tembakan yang mengakibatkan satu orang tewas. Kerumunan pagi itu pun bubar dengan sendirinya.

Berita tentang kejadian pagi yang dinamai “Peristiwa jalan Bali” itu menyebar cepat. Siang hari kerumunan mengepung asrama itu tetapi tentara Jepang yang dikerahkan dari markas mereka di dekat Polonia berhasil membubarkan aksi siang itu. Sore hari, sekitar jam tiga kerumunan dalam jumlah yang lebih besar datang dan tampak mengepung asrama itu. Kerusuhan pun langsung pecah. Seorang opsir Belanda, dua orang Swiss, tujuh tentara tewas sementara 100 orang luka-luka. Dari kerumunan hari itu tercatat 99 orang tewas dengan jumlah yang terluka lebih banyak.^{xviii}

Sejak hari itu, Medan terasa mencekam. Inggris semakin sering menggeledah bahkan kantor Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan pun ikut digeledah dan menyita sepucuk pistol dari laci meja sang Gubernur. Harian *Pewartu Deli* yang baru saja terbit langsung dibredel, termasuk menangkap Mohammad Said yang menjadi *hoofdredacteur*.^{xix} Aksi Inggris itu dilanjutkan dengan aksi teritorial dengan menetapkan suatu kawasan dengan yang dipasang plank bertuliskan *Fixed Boundaries Medan Area*.

Dari plank itulah istilah Medan Area jadi populer. Inggris yang mengawal transisi di Hindia Belanda menetapkan Medan sebagai pusat teritori yang kaya untuk mendukung kelangsungan ekonomi, politik dan militer. Jumlah penduduk dalam kawasan ini juga banyak, mencapai 250.000 jiwa (1946). Itulah sebabnya, batas-batas teritori dibuat melingkari kota Medan, mulai dari Labuhan-Hamparan Perak di Utara, Tanjung Morawa-Asam Kumbang di Selatan, Klambir Lima-Buluhcina di Timur dan Tuntungan-Sunggal di sebelah Barat.^{xx}

Pengalihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda pada Oktober 1946 membuat masalah semakin runyam. Inggris harus angkat kaki. Pengalihan ini membuat banyak pihak khawatir termasuk dua ulama terkemuka di Sumatera Timur, Kyai Abdul Halim Hasan dari Binjai dan Kyai Zainal Arifin Abbas yang kemudian menyurati Tgk. M. Daud

Beureueh, ketua PUSA agar Muslimin di Aceh ikut membantu Muslimin di Sumatera Timur untuk melancarkan Perang Sabil.

Gayung pun bersambut. Keputusan PUSA ditindaklanjuti TRI Aceh. Awal Desember 1946. Panglima Divisi V TRI Komandemen Sumatera, Kolonel Husin Jusuf mengirim Resimen II Divisi Gajah yang dipimpin Mayor Cut Rahman untuk membawa artileri berat ke Binjai. Pengiriman ini membuat Belanda cemas, apalagi sejak awal mereka memang tidak ingin terlibat masalah dengan orang Aceh. Bantuan ini menjadi dasar lahirnya Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RIMA) yang bermarkas di Binjai.

Sokongan dari Aceh tidak berhenti di situ. Pada bulan yang sama, setelah Mayor Cut Rahmani mengantar meriam yang ditempatkan di sebuah mesjid, Letnan Nukum Sanany membawa senapan mesin, meriam tambahan sekaligus pasukan meriamnya ke Binjai atas nama Laskar Mujahidin. Di Kota ini pasukan Sanany bergabung dengan Hizbullah yang dipimpin Haji Abdul Halim Hasan-Zainal Arifin Abbas dan Detasemen Polisi Tentara yang dipimpin Letnan Hasanuddin.

Sejak pengiriman meriam pertama dari Aceh, para pejuang Aceh tak pernah henti datang untuk bertempur di Medan Area. '*Jak u front Medan Area!*' (Ayo ke front Medan Area!) ajakan ini sering terdengar di kalangan tentara dan laskar rakyat di Aceh. Meskipun masalah internal masih menggelayuti, mulai dari hal-hal yang sepele sampai yang serius kerap mengganggu alur komando dan rencana di Medan Area tetapi semangat untuk bertempur di Medan Area tetap tinggi.

Arus kedatangan pejuang dari Aceh semakin deras. Setelah pasukan Mayor Cut Rahman, bergantian semua kesatuan dikerahkan ke Medan Area, termasuk pasukan Manyak. Pasukan Seulimeumeun yang dipimpinnya dikerahkan ke front Medan Area sekitar tahun 1947 sebelum agresi pertama. Pasukan Manyak ini berkedudukan di Binjai tetapi seperti kesatuan lain, pasukannya bertugas "menggedor" sekaligus menjaga pertahanan yang letaknya di daerah-daerah perkebunan dan perkampungan yang berhimpitan dengan garis sempadan Medan Area, mulai di sekitar Kampung Lalang, Klambir sampai Hampan Perak. Namun area yang terpenting ialah menjaga jalan Raya Medan-Binjai.

Selama tiga bulan bertugas di Binjai, Manyak mendapat pengalaman pahit. Banyak anak buahnya yang gugur di medan pertempuran ini. Waktu itu beliau sudah punya tiga orang anak yang ditinggalkan bersama Maryam di Indrapuri.^{xxi} Kehilangan anak buah meninggalkan bekas yang tak mudah hilang dari ingatannya. Benar saja, suatu waktu di usianya yang mulai senja, ketika kendaraan Manyak melintasi Kampung Lalang, spontan Manyak bilang: *'Nyo pat kamoe dile berjuang!'* kepada Cut Mardiah anaknya sambil menunjuk sungai yang membelah jalan lebar penghubung Medan dengan Banda Aceh dan pasar di dekatnya.^{xxii}

Pengalaman di Kampung Lalang di front Binjai itu tidak bisa hilang dari ingatan Manyak. Raungan mesin pesawat tempur P51 Mustang yang memuntahkan peluru dari senapannya, dentuman meriam dan rentetan tembakan dari senjata mesin canggih dari pihak Belanda terus diingatnya. Agresi Militer I 1947 yang disebut Belanda sebagai *Politioneel Actie* memaksa semua kesatuan mundur tanpa kecuali. Inilah akhir dari cerita penugasan Pasukan Seulimeumeum pimpinan Manyak di Medan Area.

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda yang telah sepenuhnya memegang kendali atas Sumatera Timur melancar operasi militer dengan sandi *Produkt Operatie* ke objek-objek vital di Sumatera dan Jawa.^{xxiii} Perkebunan, pabrik, bank dan kantor pemerintahan adalah sasaran utamanya. Operasi militer ini menjadi bukti bahwa Belanda yang ekonominya terseok-seok pasca-Perang Dunia II memang benar adanya. Akibat serangan yang berlangsung hingga awal Agustus 1947, Medan jatuh ke tangan Belanda dan tidak pernah bisa direbut lagi.

Radiogram Panglima TRI Sumatera, Mayor Jenderal Suharjo Harjowardoyo yang berkedudukan di Bukittinggi bahkan memerintahkan kepada seluruh Pemimpin-pemimpin Rakyat Aceh agar merebut kembali Kota Medan. Isi radiogram itu ialah *"Pengembalian Kota Medan terletak di tangan saudara-saudara segenap penduduk Aceh. Jangan sangsi. Alirkan terus kekuatan Aceh ke Medan dan jangan berhenti sebelum Medan jatuh"*.^{xxiv} Namun sekali lagi sayang, Medan tidak pernah bisa direbut lagi sampai pengakuan kedaulatan di akhir tahun 1949.

Jatuhnya Medan disusul Kabanjahe dan Stabat memaksa seluruh kesatuan tentara yang namanya sudah diubah menjadi TNI untuk menataulang struktur komandonya. Panglima Divisi X

Komandemen Sumatera sekaligus Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Mayor Jenderal (tituler) Tgk. M. Daud Beureueh membagi kawasan yang berada dalam rangkaian Bukit Barisan ini dalam delapan sektor. Masing-masing sektor dipimpin seorang komandan dan tiap komandan sektor bertanggung jawab atas terhadap daerah-daerah yang telah diberi tanda khusus di dalam peta TNI waktu itu.

Dalam penataan organisasi ini Manyak diangkat menjadi Komandan Sektor V. Komando Sektor V ini bertanggungjawab atas wilayah Tanah Karo yang masih dikuasai TNI hingga ke wilayah Aceh Tengah. Selain itu, Manyak mendapat tugas tambahan untuk mengkoordinir batalyon Kapten Minggu yang bertugas di sekitar Tanah Karo-Dairi dan kesatuan bernama *Barisan Gurilla Rakyat* yang terkenal dengan singkatannya: *Bagura*. Kesatuan ini dipimpin Tgk. Ilyas Leube dari Takengon dan kompatriotnya, Tgk. Moh. Saleh Adri.^{xxv}

Medan operasi Sektor V terbilang sulit. Lebatnya hutan dataran tinggi itu dan cuaca dingin cukup memberatkan tugas pasukan yang memilih taktik gerilya. Serangan Belanda yang semakin gencar ke pos terdepan yang masih dapat dikendalikan TNI menambah berat tugas kesatuan di Sektor ini. Tugas makin berat ketika Wakil Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Mayor Djamin Gintings terpaksa mundur dari Kabanjahe dan berkantor sementara di Kutacane. Kota tempat pejabat militer berdiam inilah yang harus terus dijaga.

Selain itu, daerah di dataran tinggi Tanah Karo, Dairi, Aceh Tenggara tidak boleh dibiarkan terbuka, harus dijaga ketat. Sebab di sinilah letak pintu masuk ke Aceh yang pernah dilalui van Daalen. Dari "pintu" ini, van Daalen berhasil menundukkan perlawanan rakyat Aceh dengan jatuhnya kubu pertahanan terakhir yang tersisa di Kuta Tampeng dekat Blangkejeren. Oleh karena itu posisi pasukan Belanda di sekitar Kabanjahe-Tiga Lingga harus terus didesak untuk mengamankan jarak ke Kutacane.

Kedudukan Belanda di sekitar Kabanjahe menjadi magnet yang menarik perhatian kesatuan tentara dan laskar rakyat di Aceh Tenggara dan Tengah. Semangat untuk melakoni *Prang Sabee* membunyah apabila orang Aceh dihadapkan dengan Belanda. Semangat inilah yang kemudian digunakan untuk memperkuat kesatuan dan menyusun rencana serangan-serangan atas posisi

pasukan Belanda yang tampaknya tidak bisa keluar terlalu jauh dari Kabanjahe.

Sekitar 1947, dalam satu operasi yang direncanakan dengan baik, pasukan Sektor V berhasil mengusir pasukan Belanda yang menguasai Tiga Lingga. Menurut cerita warga sekitar, sebuah tank Belanda berhasil dilumpuhkan. Pekan yang di masa kolonial menjadi ibukota *onderdistrict van Karo Kampong* ini terletak di pedalaman hutan Dairi tetapi penting peranannya bagi perekonomian. Selain menjadi lintasan utama, Tiga Lingga juga dikenal sebagai daerah pertanian maju yang memasok sebagian besar kebutuhan masyarakat di Dairi dan Kutacane.

Pekan kecil yang morfologinya memanjang mengikuti jalan inilah yang direbut kembali oleh pasukan Sektor V. Untuk mengenang pertempuran itu, warga Tiga Lingga membangun sebuah tugu perjuangan. Menurut Cut Mardiah, anak Manyak yang tinggal di Ajun, pada prasasti tugu itu terukir nama ayahnya serta kesatuannya yang dipimpinya. Cut Mardiah mengetahui hal itu dari kisah orang yang pernah ke sana meskipun dia belum pernah melihat langsung.^{xxvi}

Awal 1948, kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata dijalankan pemerintah. Kebijakan Kabinet Hatta yang memerintah sejak Januari 1948 itu bertujuan penyatuan dan efisiensi organisasi tentara dalam satu garis komando tanpa ada ideologi yang memisahkan dan meningkatkan kemampuan tempur. Tujuh divisi tentara kemudian dicitkan menjadi empat. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan di mana-mana tidak terkecuali di kesatuan tentara di Aceh dan Sumatera Utara. Tidak saja dengan kesatuan laskar rakyat tetapi juga di kalangan tentara sendiri.

Reorganisasi TNI di Aceh berlangsung alot, bahkan jika merujuk peristiwa di akhir tahun 1947, hal itu sudah berlangsung sebelum kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi dimulai. Selama 28-31 Desember 1947, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo menggelar rapat Panitia Perancang Pembentukan TNI di Aceh dan Sumatera Timur. Hasilnya ialah pembentukan Dewan Pimpinan Sementara TNI yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Tituler Tgk. A. Wahab, dibantu Kolonel R.M.S. Suryo Sularso sebagai wakil ketua ditambah tiga orang penasehat, yaitu T.M. Daudsyah (Residen Aceh), Tuanku Mahmud (Inspektur Residen) dan T.M. Amin (Kepala Bagian Pemerintahan Umum Residen Aceh).

Dewan ini bekerja selama enam bulan. Selama enam bulan masa kerja dewan *ad-hoc* itu pasukan TNI berada dalam posisinya masing-masing. 13 Juni 1948, Dewan mengumumkan komposisi Komando Divisi X Komandemen Sumatera (*sic*). Hal yang mengejutkan ialah Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo Tgk. M. Daud Beureueh “memberhentikan: Kolonel Husin Jusuf yang sebelum ini menjabat Panglima Divisi, divisi bergengsi di Aceh.

Keputusan itu membuat suasana sedikit menghangat. Tidak lama setelah itu, 29 tokoh masyarakat dan militer terkemuka dari Aceh menyampaikan petisi yang dibertajuk *Kepoetoesan* kepada Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Isi pokok *Kepoetoesan* itu ialah meminta Tgk. M. Daud Beureueh mengembalikan kedudukan Kolonel Husin Jusuf sebagai Panglima Divisi TNI Komandemen Sumatera. Banyak yang waktu itu menjabat Komandan Resimen III di Meulaboh turut menandatangani *Kepoetoesan*.^{xxvii}

DI ANTARA DI DAN RI

Berselang hampir empat tahun setelah *tarikh* proklamasi DI/TII itu tanda-tanda pergolakan akan berakhir mulai muncul. Pada tanggal 27 Februari 1957, dua *aneuk* Aceh yang berseberangan, Perdana Menteri Darul Islam (DI) Teungku Hasan Aly dan Mayor TNI Sjamaun Gaharu, Penguasa Perang Daerah Aceh sepakat untuk bertemu dan membicarakan masa depan Aceh.^{xxviii}

Pertemuan digelar di Lam Teh dan menghasilkan sebuah ikrar antara DI dengan Republik yang dinamai Ikrar Lam The. Ikrar ini berisi tiga butir pernyataan itu menjadi babak baru di Aceh yang sedang bergolak, apalagi ikrar yang kemudian *diteken* Gubernur Aceh Ali Hasjmy disebarluaskan kedua belah untuk menghentikan baku tembak dan mengakhiri permusuhan meskipun hal itu lebih merupakan hasil adu kepentingan politik kedua belah pihak.^{xxix}

Sejak hari di mana ikrar itu dikukuhkan, harapan akan tumbuhnya kedamaian di Aceh melambung tinggi. Sejak itu, pertemuan dan komunikasi di antara pejabat DI atau tentara DI dengan Perwira TNI untuk berunding atau berkooordinasi semakin sering berlangsung di sejumlah tempat di Aceh, mulai dari Kutaraja sampai daerah-daerah basis DI di Pidie dan Aceh Utara.

Meskipun pertemuan antara kedua belah pihak sering dipanaskan oleh *tensi* yang meninggi-naik karena emosi masing-masing orang dan perasaan saling curiga masih terasa kuat, jalan menuju perdamaian dan *islah* sebagaimana yang diharapkan banyak orang itu tetap terbuka lebar. Oleh karena masalah-masalah yang bersifat teknis, selain masalah prinsipil yang menghiasi poin-poin tawar-menawar mengenai masa depan Aceh tidak begitu dipersoalkan juru runding dari kedua belah pihak.

Masalah politik atau sederet dampak psikologis yang dialami masyarakat awam akibat operasi militer yang dilancarkan oleh kedua belah pihak dan sering memicu naiknya tensi para juru runding dari kedua belah pihak itu pun ternyata bukan jadi penghalang berat. Beberapa hal, baik syarat yang ditekankan Jakarta melalui Perwira TNI di Aceh maupun yang dituntut pejabat DI selalu dirundingkan.

Pembebasan tahanan politik Aceh oleh TNI hingga pemulangan kesatuan TNI asal Aceh yang ditugaskan di luar Aceh bisa dipenuhi tanpa harus menunjukkan urat leher kuat-kuat meski tuntutan itu sering disepakati setelah melalui perdebatan sengit. Pembebasan tahanan politik Aceh yang disebar pada beberapa rumah tahanan atau di markas kesatuan TNI di beberapa daerah juga berlangsung tanpa hambatan berarti.

Pemulangan kesatuan TNI asal Aceh yang sebelum Aceh bergolak berada di bawah Komando Tentara Teritorium I Sumatera Utara dan dipimpin para Perwira asal Aceh pun dapat disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Pemulangan kesatuan TNI asal Aceh yang menjadi tulang punggung tentara nasional selama Perang Kemerdekaan ini dilangsungkan secara bertahap.

Batalion TNI di bawah pimpinan Mayor Alamshah yang bertugas di Sulawesi Selatan dipulangkan pertengahan pada 1958. Batalion Mayor Manyak yang ditugaskan di Padang, Sumatera Barat menyusul tidak lama setelah kesatuan rekannya itu kembali ditempatkan di Kutaraja.^{xxx} Kembalinya TNI ke Kutaraja, kota yang pernah menjadi pusat komando Darul Islam di Aceh menjadi modal berharga bagi kelanjutan *cessation of hostilities* atau penghentian permusuhan antara Darul Islam dan Jakarta yang telah dibina pada awal 1957 lalu.

Harapan masyarakat Aceh pada kelanjutan perdamaian itu juga didukung oleh kebijakan kabinet yang jatuh-bangun, terutama kabinet yang dipimpin Masjumi. Usulan penyelesaian masalah di Aceh yang disarankan sebelum ini bahwa '*masalah di Aceh hanya dapat diselesaikan oleh orang Aceh sendiri*' diterima Jakarta tanpa syarat berarti dan masalah.^{xxxii}

Penetapan Aceh sebagai provinsi pada tanggal 7 Desember 1956 dan penetapan Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh oleh Menteri Dalam Negeri Sunario sebulan setelah itu menjadi lompatan besar dalam penyelesaian masalah politik di Aceh. Penetapan ini menjadi

babak akhir dari suatu pengakuan nasional terhadap Aceh dan orang Aceh. Selama Perang Kemerdekaan, Aceh menjadi satu-satunya daerah yang tidak pernah dikuasai Belanda, kontribusi masyarakat Aceh untuk perjuangan juga luar biasa hingga Aceh didaulat sebagai “Daerah Modal” bagi Indonesia.

Setelah setahun tanpa gejolak berarti, proses perdamaian di Aceh memasuki masa kritis ketika Letnan Kolonel Ahmad Husein mengultimatum Jakarta. Salah satu perwira TNI dari masa Perang Kemerdekaan itu kemudian membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 di Padang. Gayung pun bersambut. Dua hari setelah itu, kelompok perwira menengah TNI di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang berhimpun dalam Dewan Manguni mendukung PRRI dengan mengukuhkan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Makassar.

Kisruh ini mempengaruhi proses rekonsiliasi di Aceh secara langsung, apalagi kontak antara DI dengan kelompok PRRI-Permesta sempat terjadi dan berlangsung cukup panjang.^{xxxii} Kontak itu berkaitan dengan rencana pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang tidak menghasilkan apapun karena timbul perbedaan tajam dalam menempatkan agama pada negara yang tengah dirancang itu.

Peristiwa di Padang disusul Makassar membuat konsentrasi TNI di Aceh terbelah. Letnan Kolonel Maludin Simbolon, Ketua Dewan Gajah yang seharusnya memberikan dukungan pada operasi-operasi dan usaha TNI di Aceh dari Sumatera Utara kini berada di pihak yang berseberangan dengan kesatuan TNI di Aceh. Masalah pun berkembang dan menjadi rumit, apalagi beredar rumor ada ketidakcocokan di antara perwira menengah di Sumatera Utara.

Ketidakcocokan ini kerap berujung keributan di antara kesatuan TNI yang komandan maupun anggotanya berasal dari kelompok etnik yang sama. Petinggi dan beberapa kelompok di tubuh DI pun tampak bimbang dan pesimis dengan janji berdamai yang diikrarkan. Pengalaman “ditipu” Jakarta selama Perang Kemerdekaan agaknya masih membekas dalam ingatan petinggi DI terutama, Teungku M. Daud Beureueh yang kemudian memindahkan kedudukan DI ke Beureunuen, Sigli.

Peristiwa itu juga membuat upaya perdamaian terutama membujuk membujuk pemimpin tertinggi DI, Tgk. M. Daud Beureueh

dan pengikutnya untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi semakin sulit dan hampir menemui jalan buntu. Jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masjumi dan berkuasanya kembali Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) membuat kebanyakan orang Aceh kecewa dan pesimis dengan komitmen Jakarta pada Ikrar Lam Teh.

Ini menjadi masalah tersendiri yang membuat harapan akan kedamaian di Aceh hampir sirna. Kebijakan Kabinet Burhanuddin Harahap yang sebelum jatuh lebih mengedepankan diplomasi dan rekonsiliasi dalam menangani masalah Aceh berubah lagi di tangan Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani pemberontak Aceh, meskipun ada sosok Muhammad Roem yang mewakili Masjumi di dalamnya.

Penempatan kembali Sjamaun Gaharu, perwira Aceh asal Sigli sebagai Komandan Resimen I Tentara Teritorium Bukit Barisan menimbulkan kekhawatiran sendiri di kalangan DI. Gaharu disebut punya dendam dengan kelompok Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Pengalaman ini terjadi di Kampung Aree sekitar Grong-grong ketika Cumbok bergolak, Gaharu yang masih berpangkat Letnan ditangkap bahkan hampir dibunuh laskar PUSA meskipun akhirnya dibebaskan tetapi harus keluar dari Aceh sebagai tahanan Polisi Tentara.^{xxxiii}

Penempatan Gaharu di Aceh yang sebelum Ikrar Lam Teh dikukuhkan gencar menggempur basis-basis DI di Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Barat. inilah yang sedikit banyak membuat suasana kian memanas. Apalagi kelompok DI juga khawatir Gaharu ambil kesempatan untuk membalaskan dendamnya setelah ditandang keluar dari Aceh tahun 1946.^{xxxiv}

Selain itu, dalam tubuh DI rupanya ada kelompok yang tetap berusaha memanfaatkan momentum itu untuk dapat menaikkan bendera sendiri. Ikrar Lam Teh dan beberapa peristiwa yang terjadi selama masa penghentian permusuhan itu belum membuat Tgk. M. Daud Beureueh percaya pada rencana perdamaian yang didorong dan diusahakan oleh para Perwira asal Aceh atau mereka yang bersimpati pada keadaan di Aceh.

Amnesti dan sejumlah tawaran terutama yang disampaikan Kolonel M. Jasin kepada mereka yang terlibat dalam DI tidak mengubah pendirian Tgk. M. Daud Beureueh. Kesetiaan pengikut

Tgk. M. Daud Beureueh juga tidak goyah. Masih banyak yang enggan turun gunung terutama kesatuan Tentara Islam Indonesia (TII) yang berasal dari Pidie. Ini sangat mempengaruhi perkembangan rekonsiliasi di Aceh bahkan hingga memasuki batas akhir penyerahan senjata dan rehabilitasi tanggal 5 Oktober 1961.^{xxxv}

Masalah bersegi banyak ini dipanaskan pula dengan timbulnya kecurigaan di antara perwira-perwira TNI asal Aceh dalam penyelesaian masalah Aceh. Sudah bukan rahasia jika peristiwa selama Perang Kemerdekaan dan sentimen kedaerahan asal di Aceh berperan memanas hubungan sosial di kalangan tentara meskipun secara kultural orang Aceh merupakan kelompok dominan.

Apalagi, sejak program reorganisasi dan rasionalisasi dijalankan. Kesatuan-kesatuan TNI terutama mulai dari kesatuan terkecil umumnya terdiri dari tentara yang berasal dari kelompok etnik atau latar belakang primordial yang sama mulai dipisahkan. Sudah rahasia umum pula jika komandan kesatuannya berasal dari Aceh Besar maka anak buahnya juga berasal dari Aceh Besar. Kesatuan yang dikirim ke Aceh juga demikian sehingga masalah seputar operasi penumpasan pemberontakan di Aceh melebar menjadi masalah yang melibatkan sentimen dalam hubungan antaretnik ini.^{xxxvi}

Di Kutaraja, masalah dalam tubuh TNI Aceh itu mencuat ketika Sjamaun Gaharu Komandan KDMA yang dipandang dengan berbagai penilaian menetapkan kebijakan "Konsepsi Prinsipil Bijaksana". Konsepsi yang berarti bahwa dengan "bijaksana" Gaharu menawarkan kesempatan kepada pemberontak untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi seraya tetap mempertahankan "prinsip" pemerintah untuk menggunakan kekuatan di mana perlu. Secara sederhana, Gaharu selalu menggambarkan kebijakan ini dengan "menawarkan tangan kanan pemerintah untuk menyalami mereka (pemberontak) sementara tangan kiri siap memukul bila mereka tidak memberikan jawaban positif".^{xxxvii}

Kebijakan Gaharu dalam menangani masalah Aceh ini mengesankan penanganan yang lebih keras meskipun di sisi lain kecenderungan pelaksanaannya dinilai lembek oleh beberapa kalangan di Jakarta terutama karena Gaharu dianggap lebih banyak berpolitik ketimbang melakukan tugas ketentaraannya.

Model penanganan keras ini sesungguhnya sudah tampak dalam pertemuan di Lam Teh. Pertemuan yang sebenarnya menemui jalan buntu itu dapat menghasilkan kesepakatan karena Gaharu maupun Tgk. Hasan Aly sama-sama “terenyuh” ketika mereka tidak tahan mendengar tangis Pawang Leman yang sejadi-jadinya. Kepala Polisi M. Isa (*sic*) yang berkomitmen menguatkuasakan Ikrar Lam Teh sebagai dasar perdamaian di Aceh. Isa mengusulkan beberapa tindakan yang akhirnya membuat jengkel Gaharu. Dalam suatu kesempatan terlontar ucapan ‘*Peu si Isa nyan ureung ke ataou ureung kah!*’ begitu kata Gaharu kepada Hasan Saleh dalam satu pertemuan karena usulan cenderung memberi angin kepada DI.

Tidak lama setelah itu, M. Isa, perwira polisi asal Aceh yang pernah ditolak kelompok politisi Batak di Medan karena pengangkatan dirinya sebagai Kepala Kepolisian Sumatera Utara ditahan dan pangkatnya dicopot Gaharu.^{xxxviii} Penangkapan Komisaris Polisi Aceh ini merupakan bagian dari penangkapan Perwira TNI asal Aceh lain yang dicurigai berkomplot dengan DI atau PRRI-Permesta.

Namun penangkapan Tuanku Husin, *uleebalang* Keumangan dan Teuku Muhammad Ali yang bersikap antipati terhadap DI menunjukkan kebijakan itu bersifat ganda. Kunjungan M. Natsir dan Burhanuddin Harahap ke Aceh untuk mempersiapkan suatu hubungan PRRI dengan DI menguatkan kecurigaan Gaharu terhadap banyak perwira TNI di jajarannya.

Tanggal 26 April 1958, Gaharu memerintahkan Kapten Nyak Usman Gade menangkap komandannya sendiri, Mayor Manyak di kediaman keluarganya di Indrapuri. Manyak, Kepala Staf Resimen Sumatera Tengah ini adalah perwira Aceh yang ditariknya sendiri dari Padang ke Kutaraja untuk membentuk satu resimen Aceh yang terdiri dari orang Aceh dan dipimpin sendiri oleh Perwira Aceh.

EPILOG

Selasa malam, 26 April 1958 Mayor Manyak, Komandan Batalyon 136 “dijemput” dari rumahnya di Indrapuri. Perwira Komando Daerah Militer Aceh yang kerap menunjukkan sikap kritis menanggapi perkembangan situasi di Aceh yang memanas ini akhirnya turut “diamankan” juga.

“Ada tamu di Banda Aceh!” begitu lapor si komandan padanya malam itu.^{xxxix} Manyak paham situasi dan memilih mengikuti perintah. Ia sempat memberi perintah agar pasukan yang menunggunya agar ia dapat mengenakan seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan *badge* bergambar kepala gajah putih dengan telinga mengembang, lambang KDMA masa itu.

Malam ketika “dijemput” itu Manyak tidak bicara. Dari anak tangga terakhir rumahnya, ketika kedua tangannya digari, Manyak menatap satu persatu anggota pasukan yang masih berstatus anak buahnya itu. Mereka yang bersiaga itu diam seperti tidak sanggup memberi alasan selain berucap dalam hati: “kami hanya menjalankan perintah!”

Tangis langsung pecah dari dalam rumah ketika kesatuan itu membawa Manyak. Sejak hari itu hingga tiga bulan berikutnya, isterinya, Maryam tidak pernah mendapatkan kabar mengenai keberadaan suaminya. Belakangan baru diketahui, bahwa Rabu pagi Manyak langsung diterbangkan ke Jakarta dan dijebloskan ke rumah tahanan militer di sekitar Senen.^{xl}

Sebelum Manyak “dijemput”, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Komisaris Muhammad Insya sudah diamankan lebih dahulu. Pada keduanya dituduhkan pada Mayor Manyak lebih serius lagi: Manyak terlibat PRRI! Jakarta yang alergi dengan PRRI langsung bertindak

membabi buta. Presiden Sukarno menyebut aksi perwira menengah di Sumatera yang makin gerah karena Presiden dekat dengan PKI ini sebagai pemberontakan. Tanpa banyak pertimbangan Sukarno mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontak.

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dicetuskan dan dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Perwira *cakap* asal Minang yang ditempa Perang Kemerdekaan 1945-1949 ini adalah atasan langsung Manyak selama menjadi Kepala Staf Dewan Banteng di Padang. Tuduhan lain yang ditimpakan pada Manyak ialah berkomplot dengan DI/TII yang menurut desas-desus masa itu akan mendukung dan menjadi bagian dari PRRI yang baru menyatukan kekuatan dengan Permesta yang bergerak di Sulawesi.



Teuku Manyak di masa tua

(Sumber: Ilham Syahputra, Keluarga Teuku Manyak, Ajun Jeumpet - Aceh Besar)

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, Kutaradja: Penerbit Murnihati, 1956.
- Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak, Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- M. Nur El Ibrahimy, *Tgk. M. Daud Beureueh, Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Payung Bangun, *Kolonel Maludin Simbolon, Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Ramadhan KH dan Hamid Jabbar, *Sjamaun Gaharu, Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Sayed Mudhahar Ahmad, *Ketika Pala Mulai Berbunga: Seraut Wajah Aceh Selatan*, Tapaktuan: Pemerintah Daerah Aceh Selatan, 1992.
- Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area*, Jakarta: Yayasan Seulawah RI 001-Pelita Persatuan, 1992.

Catatan

¹ Salinan naskah proklamasi NII Aceh oleh Tgk. M. Daud Beureueh dan NII yang diproklamirkan S.M. Kartosuwidjo terdapat dalam A.H. Gelanggang, *Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik Mr. S.M. Amin*, Kutaradja: Penerbit Murnihati, 1956, hlm. 26-27.

ⁱⁱ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 52.

ⁱⁱⁱ *Ibid.*, hlm. 52-54.

^{iv} Kalimat dalam bahasa Aceh yang berarti: "Saya hendak menikah dengan anak Teungku"

^v Cut Asiah, *Wawancara*, (Ajun Jeumpet, Aceh Besar), 4 Januari 2014.

^{vi} Djajusman, *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL)*, Bandung: Angkasa, 1978.

^{vii} Tgk. A.K. Jakobi yang merujuk makalah Sjamaun Gaharu dalam 'Seminar Perjuangan Aceh', Medan, 22-25 Maret 1976, menuliskan tidak ada nama Manyak dalam 18 perwira angkatan pertama mungkin sekali beliau angkatan kedua bersama Hasballah Haji, T. Hamzah, Nyak Adam Kamil, Hasan Saleh dan Alamsyah. Tgk.A.K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area*, Jakarta: Yayasan Seulawah RI 001- Pelita Persatuan, 1992, hlm. 39-41.

^{viii} Hafsah, *Wawancara* (Kotamatsum), 28 September 2013.

^{ix} Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 237.

^x Petrik Matanasi, *Sang Komandan*, Yogyakarta: Trompet, 2012, hlm. 7.

^{xi} Tgk. A.K. Jakobi, *Op.cit.*, hlm. 39.

^{xii} Pendidikan *Gyugun* dengan kemungkinan beliau lulusan angkatan kedua disebutkan oleh anak sulung Manyak. Cut Asiah, *Wawancara*, (Ajun Jeumpet, Aceh Besar), 4 Januari 2014.

^{xiii} Hafsah, *Wawancara* (Medan), 27 September 2013.

^{xiv} Ramli, *Wawancara* (Ajun Jeumpet), 4 Januari 2014.

^{xv} Tgk. A.K. Jakobi, *Op.cit.*, hlm. 46.

^{xvi} Berdasarkan kabar yang diterima Inggris dan NICA di Medan, jumlah persenjataan Jepang di Aceh yang berhasil direbut oleh kesatuan TKR/TRI di Aceh mencapai dua resimen termasuk artileri antiserangan udara. *Ibid.*, hlm. 66.

^{xvii} Cut Mardiah, *Wawancara* (Ajun Jeumpet), 4 Januari 2014.

^{xviii} Biro Sejarah Prima, *Perjuangan Kemerdekaan dalam Wilayah Sumatera Utara: Medan Area Mengisi Proklamasi*, Medan: Bamus Prima, 1976, hlm. 136

^{xix} Teuku Mohammad Isa (Ed.), *Mr.Teuku Moehammad Hasan, dari Aceh ke Pemersatu Bangsa*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 1999, hlm. 271. Muhammad TWH, *Sejarah Perjuangan Pers Sumatera Utara*, Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, 2001, hlm. 116.

^{xx} Tgk. A.K. Jakobi, *Op.cit.*, hlm. 112.

^{xxi} Hafsah, *Wawancara* (Medan), 27 September 2013.

^{xxii} Cut Mardiah, *Wawancara* (Ajun Jeumpet), 4 Januari 2014.

^{xxiii} Pierre Heijboer, *Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*, Jakarta: KITLV, 1998.

^{xxiv} Tgk. A.K. Jakobi, *Op.cit.*, hlm. 164.

^{xxv} *Ibid.*, hlm. 193

^{xxvi} Cut Mardiah, *Wawancara* (Ajun Jeumpet), 4 Januari 2014.

^{xxvii} Tgk. A.K. Jakobi, *Op.cit.*, hlm. 198-200.

^{xxviii} Tokoh yang hadir dalam pertemuan di Lam Teh dekat Ujong Pancu ini adalah Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu, Kepala Kepolisian Aceh dan Sumatera Utara M. Insyah, Mayor A. Sani, Kapten Usman Nyak Gade dan Ismail dari pihak TNI. Utusan Darul Islam (DI) yang hadir adalah Perdana Menteri Teungku Hasan Aly, Menteri Pertahanan Hasan Saleh, Menteri Penerangan Abdul Gani Mutyara, Ishak Amin dan Wedana Pawang Leman; Ramadhan KH dan Hamid Jabbar. *Sjamaun Gaharu, Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, hlm. 338. Berdasarkan keterangan Hasan Saleh, pihak TNI yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sjamaun

Gaharu, Kepala Kepolisian Aceh Komisariss M. Isa, Kapten Abdullah Sani, Kapten Usman Nyak Gade yang menjadi penghubung TNI dengan DI serta Ishak Amin. Perdana Menteri Teungku Hasan Aly, Ayah Kade atau Pawang Leman dan Hasan Saleh. Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak, Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992, hlm.308.

^{xxix} Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 265. Ramadhan KH dan Hamid Jabbar, *Op.cit.*, hlm. 338-339. Hasan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 307-309.

^{xxx} *Ibid.*, hlm. 314.

^{xxxi} Ramadhan KH dan Sjamaun Gaharu, *Op.cit.*, hlm. 331.

^{xxxii} M. Nur El Ibrahimy, *Tgk. M. Daud Beureueh, Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, hlm. 202-206. Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit.*, hlm. 316-318.

^{xxxiii} Hasan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 66-67.

^{xxxiv} Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit.*, hlm. 266.

^{xxxv} *Ibid.*, hlm. 322-324.

^{xxxvi} Silahkan rujuk peristiwa Pulot-Cot Jeumpa 26 Februari 1955, *Ibid.*, hlm. 144-145.

^{xxxvii} Nazaruddin Sjamsuddin, *Op.cit.*, hlm. 265-266 dan 274-275, juga rujuk 276-280.

^{xxxviii} Hasan Saleh, *Op.cit.*, hlm. 315.

^{xxxix} Hafsah, *Wawancara* (Kotamatsum), 28 September 2013. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990, hlm. 285.

^{xl} Maryam isteri Manyak tidak mengetahui keadaan suaminya hingga tiga bulan berikutnya tetapi menurut adiknya Hafsah, ketika pesawat yang membawanya ke Jakarta singgah di Medan, Manyak sempat menemui suami iparnya Razali di Medan dan berpesan '*Saya sudah ditangkap, tidak tahu entah sampai kapan, minta tolong jaga isteri dan anak-anak saya*' begitu seperti yang ditirukan Hafsah. Hafsah, *Wawancara* (Kotamatsum), 28 September 2013.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PROVINSI ACEH
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)

Jl. TWK. Hasyim Banta Muda No. 17, Gp. Mulia, Banda Aceh - 23123
Telp/Fax. 0651-23226 | Email: bpnbaceh@kemdikbud.go.id
Website. <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaseh/>